

**PATRONASE POLITIK ERA REFORMASI:  
ANALISIS PILKADA DI KABUPATEN TAKALAR DAN PROVINSI JAMBI**Leo Agustino<sup>1</sup>***Abstract***

*This article discusses the political reform in Indonesia which is less produce desirable changes. The case of local elections in Jambi and Takalar Province showed the form of political patronage in bureaucracy so that politics at the local level does not successfully educate and finalize the consolidation of democracy in Indonesia. This a article claims that the situation is nothing more tha the continuation of what so called political legacy of an earlier era. This immaturity caused by the pull of economic interests that drive the political patronage. As a result, political reform in Indonesia is difficult to fertilize a substantial democracy due to the emerging as poisoned democracy.*

**Keywords:** *political patronage, local politics, Takalar, Jambi*

---

<sup>1</sup> Dosen di Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Serang, Banten. E-mail penulis: [leoagustino@yahoo.com](mailto:leoagustino@yahoo.com)  
Penulis berterimakasih kepada Sdr. Dori Effendi (Dosen STISIP HN Jambi) dan Sdr. Ilham Mei (kandidat PhD di PPSPS FSSK UKM) yang telah membantu mengutip data dan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber otoritatif untuk keperluan penelitian dan penulisan artikel ini.

## Pendahuluan

Dikotomi antara politisi dan birokrasi, di banyak negara berkembang, tampaknya sulit untuk direalisasikan kesejatiannya. Ini karena politisi tidak hanya berperan sebagai aktor pembuatan kebijakan, tetapi juga telah melakukan penetrasi terhadap gelanggang kerja birokrasi. Di Indonesia misalnya, campur tangan seperti ini tidak mungkin bisa dihindarkan apa lagi dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pemilukada) seperti sekarang ini. Politisi tidak hanya bersaing dalam arena ‘kontrak sosial’ tersebut, tetapi juga berkompetisi dalam gelanggang birokrasi. Keterlibatan ini bisa dirasakan mulai dari menentukan struktur organisasi dan kelembagaan birokrasi, mempengaruhi tujuan, menetapkan strategi dan program hingga menolak atau menerima usulan anggaran. Selain itu, campur tangan politisi juga terjadi dalam proses rekrutmen dan penempatan kerja (terutama eselon tingkat atas) dalam struktur birokrasi pemerintahan. Lebih dari itu logika ‘bagi-bagi jabatan’ setelah pemilihan umum baik di tingkat nasional maupun lokal sepertinya menjadi ‘adat kabiasaan’ yang tidak bisa dipisahkan dalam setiap proses politik.

Jika demikian halnya, maka konsep klasik birokrasi yang menyatakan bahwa wujud birokrasi yang netral menjadi tidak relevan. Ini karena birokrasi telah menjadi sebuah medan persaingan kepentingan bagi para aktor politik. Celaknya, gelanggang ini semakin mendapat ruang yang sangat luas dalam pemilukada langsung yang menyediakan peluang bagi tumbuh suburnya patronase politik. Kesetiaan, pelayanan berpihak dan ‘upeti’ menjadi alat tukar utama dalam konteks ini. Oleh sebab itu, tidak heran apabila preferensi politik para birokrat terhadap politisi menjadi hal yang sangat sensitif, karena ia bisa menjadi alat ‘pembunuh’ bagi masa depan para birokrat. Merujuk pada realitas tersebut, artikel ini turut membincangkan perkara ini yang didasarkan pada beberapa persoalan seperti, apa yang dimaksud dengan patronase? ‘Area’ mana saja yang digunakan oleh para politisi untuk membangun patronase politiknya dalam birokrasi? Dan, ‘upeti’ seperti apa yang didistribusikan oleh para politisi (patron) manakala kesetiaan sudah diterimanya dari para bawahan (klien)? Berangkat dari beberapa pertanyaan inilah, tumpuan bahasan artikel ini diarahkan kepada patronase politik dalam birokrasi pada era reformasi. Untuk mengurai fenomena ini, maka artikel ini dipecah ke dalam tiga bagian. Pertama, mendiskusikan kerangka konseptual patronase politik yang berkait erat dengan analisis artikel ini. Kedua, membahas studi kasus konstelasi dan patronase politik yang terjadi di Kabupaten Takalar pada Pilkada 2007. Ketiga, mengelaborasi patronase yang juga terjadi di Pilkada Provinsi Jambi tahun 2010 dan, akhir sekali, merumuskan kesimpulan dari artikel ini.

### Patronase politik: birokrasi sebagai arena distribusi kepentingan

Patronase merupakan konsep kekuasaan yang lahir dari hubungan yang tidak seimbang antara patron di satu pihak dan klien di pihak yang lain. Ketidakseimbangan ini pada dasarnya berkait erat dengan kepemilikan yang tidak sama atas sumber daya dalam masyarakat. Karena itu, dalam fenomena seperti ini interelasi telah diikat oleh kepentingan dan dimanipulasi oleh tujuan masing-masing walaupun kedua-duanya berada dalam kedudukan yang tidak seimbang. Dalam konteks seperti ini Scott (1972:92) berargumen bahwa:

*The patron-client relationship—an exchange relationship between roles—may be defined as a special case of dyadic (two person) ties involving a large instrumental friendship in which an individual of higher socioeconomic status (patron) uses his*

*own influence and resources to provide protection or benefits, or both, for a person of lower status (client) who, for his part, reciprocates by offering general support and assistance, including personal services, to the patron.*

Sedangkan, Lande (1977:xx) mendefinisikan relasi patronase ini sebagai berikut:

*A patron client relationship is a vertical dyadic, i.e, an alliance between two person of unequal status, power or resources each of whom finds it useful to have as an ally someone superior member of such an alliance is called a patron. The inferior member is called his client.*

Merujuk pada uraian di atas, patronase mewujud karena adanya hubungan yang tidak setara tetapi saling membutuhkan. Di satu pihak, patron muncul sebagai individu yang mempunyai kelebihan baik dilihat dari aspek kekayaan, status maupun pengaruh. Di lain pihak, klien hadir sebagai anggota masyarakat yang tidak memiliki sumber-sumber daya yang dimiliki seorang patron. Oleh karena itu, hubungan dalam konteks ini dapat dimaknai sebagai hubungan yang berlandaskan ‘pertukaran kepentingan.’ Asumsi dasar kerangka konsep ini meletakkan cara berpikir yang menandakan bahwa hubungan akan terjadi apabila kedua belah pihak dapat memperoleh keuntungan-keuntungan dari hubungan yang mereka jalin. Paling tidak mekanisme itu seperti ini: kelompok patron memberikan bantuan ekonomi dan perlindungan kepada golongan klien atau bawahannya; dan sebagai balasan atas pemberian tersebut, maka golongan klien memberikan pengabdian dan kesetiaannya kepada sang patron.

Kendati hubungan patronase berlandaskan pada ‘nilai’ pertukaran kepentingan, tetapi pertukaran tersebut tetaplah tidak seimbang. Hal ini dikarenakan oleh penguasaan secara langsung terhadap sumber-sumber daya utama (atau *first order resources*) yang terdapat dalam lingkup masyarakat ataupun negara. Sumber-sumber ini bisa berupa jabatan, pekerjaan, lisensi dan lain-lain. Sejalan dengan fenomena ini, maka mewujud pula patron lapis kedua yang tidak memiliki sumber-sumber daya utama atau strategis, tetapi memiliki akses terhadapnya (*second order resources*) yang disebut sebagai *broker*. Para *broker* yang menjadi perantara antara patron utama dengan klien tumbuh subur di negara otokratik karena dianggap sebagai kepanjangan tangan dari individu-individu yang memiliki *first order resources*.

Sejalan dengan masalah tersebut di atas, transformasi politik yang tengah berlaku di Indonesia di mana kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, telah memberikan dampak negatifnya tersendiri bagi proses demokratisasi. Hal ini karena pemilihan kepala daerah langsung telah membuka ruang bagi patronase (logika pertukaran kepentingan) yang lebih dalam lagi. Para kepala daerah terpilih berusaha menggunakan kedudukannya untuk memainkan peranan sebagai pemilik sumber utama. Peranan ini bukanlah satu hal yang sukar untuk dilaksanakan oleh para kepala daerah, melalui kedudukannya, para pemimpin politik ini mempunyai banyak peluang untuk menggunakan institusi publik sebagai domain kekuasaannya, serta mendistribusikan *public resources* yang berada di bawah kendalinya sebagai alat pertukaran bagi tujuan tertentu ketika diperlukan. Tim sukses pun segera berubah menjadi broker politik karena dianggap memiliki *second order resources*.

Keadaan seperti terurai di atas secara otomatis semakin memperkuat kedudukan dan peranan para kepala daerah sebagai patron di kawasan yang berada di bawah kekuasaannya.

Logika ini secara sederhana menjelaskan betapa pemimpin eksekutif di level lokal mempunyai kesempatan untuk mengawal dan mendistribusikan pelbagai sumber publik (jabatan, anggaran, lisensi, proyek dan lainnya) untuk mempertahankan serta meningkatkan kedudukan dan peranannya sebagai penguasa. Realita di atas, senada dengan argumen Weingrod (1968:384) yang menyatakan: “... *close association of party with government opens new possibilities for patronage; once gained control of these resources the parties use them to serve their own electoral ends.*” Dengan kata lain, bertambahnya peranan kepala daerah—melalui partai politik yang menyokongnya—dalam merancang dan menyediakan fasilitas sosioekonomi membuat para pemimpin politik ini mempunyai peluang untuk ‘menawarkan’ pelbagai kemudahan kepada anggota masyarakat yang menjadi sasaran pelaksanaan program pembangunan tersebut. Oleh karenanya, institusi birokrasi (di tingkat daerah) dengan mudah dijadikan gelanggang bagi tawar-menawar kepentingan elit lokal.

Pertanyaan sekarang, jika birokrasi diandaikan sebagai gelanggang tawar-menawar kepentingan antara patron-klien, maka arena manakah yang digunakan untuk memperjuangkan kepentingan tersebut? Bagaimanakah mekanisme yang digunakan oleh masing-masing golongan untuk memperjuangkan kepentingan mereka? Pertanyaan ini tidak mudah untuk dijawab tanpa fakta dan data yang cukup. Tetapi setidaknya, merujuk kepada beberapa kajian klasik seperti yang dibuat oleh Allison (1978), Ripley (1978) dan Geddes (1994) terdapat sejumlah jawaban yang bisa diajukan.

Allison dalam kajiannya yang berjudul *Bureaucratic Politics* (1978) misalnya, menyatakan bahwa aparatur birokrasi yang menduduki posisi tinggi (dengan kewenangan yang tinggi pula) bisa bertindak sebagai seorang pemain utama dalam arena yang disebutnya sebagai *bureaucratic politics*. Ini karena para aparatur birokrasi berposisi tinggi tersebut terlibat secara aktif dalam setiap kontestasi dalam birokrasi, dan secara serius membangun kroninya sendiri untuk mempertahankan kepentingannya. Tidak hanya itu. Lebih lanjut menurutnya, pelbagai kebijakan yang dihasilkan oleh para birokrat ini merupakan *political bargaining outcomes*. Dalam konteks ini, *outcome* harus dipahami bukan saja sebagai solusi atas pergulatan kepentingan, tetapi juga sebagai hasil kompromi atau (bahkan) koalisi. Pertanyaannya sekarang, apa kepentingan para aktor atau elit birokrat ketika mereka bermain dalam arena birokrasi? Paling tidak ada empat menurut Geddes (1994). Pertama, birokrasi bisa dijadikan sebagai sumber keuntungan yang dapat dibagikan kepada konstituen penyokongnya. Kedua, birokrasi dijadikan sebagai lahan patronase. Ketiga, birokrasi dijadikan sumber untuk menjaring anggota-anggota baru dari organisasi politik yang ada. Dan keempat, birokrasi dijadikan sebagai sarana pelaksanaan kebijakan yang menguntungkan kelompok-kelompok kepentingan yang ada dalam masyarakat yang berafiliasi dengan para elit birokrat ataupun politisi. Argumen Geddes ini paling tidak selaras juga dengan kajian sebelumnya yang dibuat oleh Ripley (1978). Beliau menyatakan paling tidak ada dua kepentingan utama yang mendorong politisi menggunakan birokrasi sebagai arena politiknya. Pertama, dalam rangka memaksimalkan kemungkinan-kemungkinan untuk kepentingan pemilihan umum yang berikutnya dan kedua, memberikan layanan kepada para konstituennya.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Lanjut Ripley (1978) untuk memenuhi tujuan pertama, seperti tersebut di atas, ada beberapa upaya yang dilakukan—dalam hubungannya dengan birokrasi—yakni mengamandemen kebijakan yang terkait dengan undang-undang pemilihan umum, khususnya mengenai daerah pemilihan, kriteria pemilih dan komite-komite pemilihan; dan, mengamandemen undang-undang partai politik guna menjaring sebanyak mungkin keanggotaan partai dari kalangan birokrat. Manakala bagi memenuhi kepentingan kedua, para politisi biasanya terlibat aktif dalam mengatur wilayah kewenangan sebuah instansi guna melindungi

Merujuk pada penjelasan di atas, elit politik dan birokrat sama-sama memanfaatkan birokrasi untuk beberapa tujuan. Pertama, bagi kepala daerah; dijadikan tempat untuk mendistribusikan proyek dan formasi kepegawaian kepada kroninya seperti tim sukses, elit birokrat yang mendukungnya—karena mengarahkan anggota dinas, badan dan lembaga yang dipimpinnya untuk mendukung calon—dan elit ekonomi (investor politik). Kedua, bagi tim sukses dan birokrat; dijadikan wahana untuk memperoleh, mempertahankan dan (bahkan) memperluas kekuasaannya dalam birokrasi. Dikatakan ‘memperoleh’ (atau mencari peluang dalam *status quo* kekuasaan) karena boleh jadi beberapa anggota tim sukses belum memiliki jabatan, sedangkan dikatakan mempertahankan dan memperluas dimaksudkan bagi birokrat yang masih ingin terus bertahan (*survival* dalam *status quo*) ataupun naik jabatan. Persoalannya sekarang bagaimanakah aplikasi dalam memahami beberapa pendekatan konseptual di atas? Untuk itu bagian setelah ini membahasnya dalam konteks studi kasus di Provinsi Jambi.

### **Konstelasi politik dan patronase di Kabupaten Takalar sebelum dan sesudah Pemilu 2007**

Pemilu di Kabupaten Takalar diselenggarakan pada 5 November 2007 yang diikuti oleh empat pasangan kandidat. Mereka adalah (diurutkan sesuai nomor urut Pemilu) pasangan Hasanuddin Tisi dan Nashar Baso yang diusung oleh gabungan partai seperti PPP, PBS, PPD, PBR, PPN, PKPB, PKB dan PDIP; pasangan Ibrahim Rewa dan Makmur A. Sada yang diusung Partai Golkar; pasangan Burhanuddin Baharuddin dan Syamsari Kitta yang diusung oleh PNBK, PAN, Partai Merdeka, PKS, Partai Pelopor, PSI dan PKPI; dan pasangan Said Pammusu dan Ikrar Kamaruddin yang diusung oleh Partai Demokrasi Kebangsaan (Keputusan KPU Kabupaten Takalar Nomor 163/P.KWK-TK/XI/2007 tentang Tahapan, Program Penyelenggaraan Pemilihan Kepala daerah Dan wakil Kepala Daerah). Pemilu tersebut memberikan pelajaran penting bahwa dukungan partai yang banyak tidak menjamin perolehan suara yang besar. Ini karena pasangan Ibrahim Rewa dan Makmur A. Sada yang hanya diusung oleh satu partai (Partai Golkar) telah berhasil mendulang suara terbanyak dalam Pilkada tersebut sebanyak 60.353 suara. Sedangkan pasangan lain yang diusung oleh beberapa partai justru tertinggal jauh; Burhanuddin Baharuddin dan Syamsari Kitta hanya memperoleh 34.829 suara, pasangan Hasanuddin Tisi dan Nashar Baso memperoleh 29.618 suara dan bahkan pasangan Said Pammusu dan Ikrar Kamaruddin hanya memperoleh 16.844 suara (Keputusan KPU Kabupaten Takalar Nomor 22/P.KWK-TK/XI/2007 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah Tahun 2007).

Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Selain beliau adalah bupati *incumbent* pada masa itu, satu yang tidak dapat ditutupi dan pungkiri adalah karisma Ibrahim Rewa yang besar di Takalar sehingga dominasi partai dapat ditumbangkan oleh dominasi individu. Karisma Ibrahim sudah mulai dipupuknya sejak lama. Ini misalnya bisa dilihat dari jejak rekamnya berorganisasi dari tingkat bawah sehingga tingkat atas.<sup>3</sup> Pengalaman ini pulalah yang merupakan modal utama

---

kepentingan klien-kliennya dalam birokrasi, ikut menentukan konsesi dan standarisasi program yang dibuat oleh birokrasi dan melakukan dengar pendapat serta pembatasan anggaran—yang intinya memaksimalkan ruang lingkup instansi atau unit kerja para kroninya.

<sup>3</sup> Dengan pengalaman organisasi partai politik Golongan Karya serta organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi dengan Partai Golkar membuat pengalaman dan kiprah politik Ibrahim Rewa semakin matang. Pengalaman sebagai Komandan Brigade DPD II AMPI Takalar (1980-1985), Ketua I DPD II. KNPI Takalar (1978-1982), Ketua Umum DPD II KNPI Takalar (1982-1985),

Ibrahim dalam membangun karisma dan citranya di Takalar sekaligus juga menjelaskan mengapa Ibrahim Rewa berani bersaing untuk berkompetisi pada pemilihan Bupati Takalar penggal sebelumnya (periode 2002-2007).<sup>4</sup>

Selain itu, hubungan dekat dengan patronnya di provinsi (Gubernur Sulawesi Selatan, H.M. Amin Syam) yang sekaligus juga Ketua DPD Golkar Sulawesi Selatan menjadikan Ibrahim Rewa hampir mustahil ditandingi. Mengapa dikatakan demikian? Satu yang pasti Ibrahim adalah bupati yang secara langsung maupun tidak memiliki basis massa yang tersebar di beberapa kecamatan. Sebaliknya, jika memperhatikan profil para pesaingnya (Hasanuddin Tisi, Said Pammussu dan Burhanuddin Baharuddin) hanya kuat di kecamatan yang mereka tinggali.<sup>5</sup> Hasanuddin misalnya, kendati beliau adalah putera daerah Takalar, tetapi kiprahnya lebih banyak dihabiskan di Jakarta sebagai pengusaha sehingga kurang berakar. Di samping itu, Hasanuddin dianggap membonceng nama besar ayahnya sebagai kolonel purnawirawan dan tokoh masyarakat di Kabupaten Takalar. Di luar itu semua, kelemahan Hasanuddin yang menonjol dibanding Ibrahim—adalah aspek finansial. Ini karena majunya beliau sangat terbantu oleh sokongan keuangan Ketua DPP Partai Persatuan Daerah, Oemar Sapta (pengusaha sukses yang berdomisili di Jakarta). Sama halnya dengan Hasanuddin, Said Pammussu pun setali tiga uang. Kendati beliau adalah seorang mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Takalar, wakil bupati, mantan anggota DPRD Takalar, dan Ketua Partai Demokrasi Kebangsaan (serta bersahabat rapat dengan pendiri PDK, Prof. Dr. Ryaas Rasyid), tetapi Said hanya berakar di Kecamatan Mangarabombang. Elektabilitas yang tidak berakar ini juga ditemui dalam diri Burhanuddin (basis terbesarnya berada di Kecamatan Galesong Utara dan Galesong Selatan). Karena itu, kelebihan Ibrahim dibanding kandidat lainnya adalah citranya yang telah dikenal oleh ramai pemilih di banyak kecamatan di Kabupaten Takalar.

Jawaban yang sama akan muncul ketika pertanyaan diarahkan pada kandidat wakil bupati dari masing-masing pesaing (mengapa Ibrahim Rewa hampir mustahil ditandingi)? Nashar Baso yang berpasangan dengan Hasanuddin Tisi, hanya dikenal luas di Kecamatan Galesong. Ini pun karena beliau berasal dari daerah tersebut. Lebih kurang sama halnya dengan Syamsari Kitta (pasangan Burhanuddin) dan Ikrar Kamaruddin (pasangan Said); mereka hanya mempunyai basis di kecamatan Pattallassang dan di kecamatan Mangarabombang, kecamatan Mappakasunggu serta kecamatan Galesong. Malah Ikrar diketahui berasal dari etnik bugis (Kabupaten Bone) sehingga dalam kalkulasi politik Pemilukada Kabupaten Takalar dianggap tidak

---

Ketua MDI Kab. Takalar (1978-1985), Ketua Bagian Pengembangan Sarana DPD II GOLKAR Takalar (1978-1983), Sekretaris DPD II GOLKAR Takalar (1983-1988), Wakil Ketua DPD II GOLKAR Takalar (1988-1993), Ketua IPHI Takalar (1988-2003), Ketua DPD II GOLKAR Takalar (1993-1998), Ketua DPD II GOLKAR Takalar (1998-2004), Sekwan Pembina Kosgoro Takalar (1985-1990), Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Takalar (1978-1999), Anggota Dewan Pakar ICMi Takalar (1993-sekarang), Ketua Dekopin Kab. Takalar (1985-2004), Anggota Dewan Pembina KONI Takalar (2002-sekarang), Ketua DPD II GOLKAR Takalar (2004-2009), Pembina DPD II GOLKAR Takalar (2009). Selain itu, beliau pun merupakan pejabat karir yang memulai kerja birokrasinya sejak tahun 1970 ([www.takalarkab.go.id/?pilih=hal&id=17nnu](http://www.takalarkab.go.id/?pilih=hal&id=17nnu) 24 Juni 2013).

<sup>4</sup> Pada masa itu, pemilihan Bupati tidak diselenggarakan secara langsung, tetapi dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan oleh anggota DPRD Takalar. Tahun 2002, Ibrahim Rewa tidak menang mudah seperti mana dalam Pilkada 2007. Ini karena kemenangannya tipis dari pesaingnya Ichsan Yasin Limpo yang hanya dua suara—itu pun harus melalui putaran kedua. Manakala Ichsan Yasin Limpo pada masa itu adalah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (periode 1999-2004) dan merupakan adik kandung Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin. Saat ini Syahrul menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan untuk periode 2008-2013. Sedangkan Ichsan Yasin Limpo, sekarang ini, memangku sebagai Bupati Gowa untuk kali keduanya (periode I tahun 2005-2010 dan periode II tahun 2010-2015).

<sup>5</sup> Pengamatan lapangan oleh penulis pada bulan Februari dan Juni 2012.

merepresentasikan ‘keputeradaerahan’—yang diisyaratkan secara informal pada Pemilu Takalar pada tahun 2007.

Merujuk konfigurasi di atas, persoalannya sekarang, bagaimanakah Ibrahim Rewa dapat mempertahankan kekuasaannya pada Pemilu Takalar 2007? Dan, kekuatan atau instrumen apakah yang digunakan beliau untuk mempertahankan kekuasaan tersebut? Untuk pertanyaan pertama, beberapa paragraf sebelum ini paling tidak secara implisit sudah menjawab pertanyaan tersebut yakni selaku Bupati Takalar Ibrahim secara langsung ataupun tidak memiliki basis massa yang tersebar di beberapa kecamatan. Argumen kedua, selaku ketua Golkar Takalar periode 2004-2009, beliau mendapat sokongan mutlak lagi kuat dari Pengurus DPD II Golkar Kabupaten Takalar. Ini ditunjukkan melalui konvensi Golkar pada 26 Maret 2007 yang mengikrarkan beliau berpasangan dengan pejabat Wakil Bupati Takalar 2002-2007, Makmur Andi Satta, yang juga ketua Ormas Kosgoro Kabupaten Takalar untuk maju pada Pemilu Takalar 2007. Pasangan ini kemudian lebih dikenali dengan sebutan ‘Irama’ selama kampanye Pemilu Takalar. ‘Irama’ sendiri merupakan kependekan dari Ibrahim Rewa dan Makmur Satta. Satu lagi indikasi kekuatan Ibrahim untuk kekal mempertahankan kursi bupati di Kabupaten Takalar adalah adanya peranan pengurus kecamatan di tujuh kecamatan menyatakan dukungannya kepada Ibrahim dan siap membantunya dalam penyuksesan dirinya sebagai Bupati Takalar untuk periode 2007-2012.

Sedangkan instrumen yang digunakan Ibrahim untuk mempertahankan kekuasaannya pada Pemilu Takalar 2007 antaranya, pertama, memanfaatkan posisi dan peran birokrat yang sentral. Selaku kepala daerah Ibrahim Rewa dengan mudah ‘menggunakan’ birokrat sebagai tim inti pemenangannya dalam Pemilu Takalar. Ketua Tim Pemenangan beliau adalah Drs. Syarifuddin Hamzah, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Kabag Humas Kabupaten Takalar) yang sebelumnya berlatar belakang pegawai Kementerian Penerangan.<sup>6</sup> Di bawah Ketua Tim Pemenangan terdapat Manajemen Tim Pemenangan yang diperankan secara berlapis-lapis mulai dari Tim inti, Tim Keluarga dan Tim Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).<sup>7</sup> Semua tim

---

<sup>6</sup> Pengalaman hampir 25 tahun sebagai Juru Penerangan di tingkat kecamatan dan kemampuannya berdakwah di Masjid membuatnya memiliki simpul-simpul massa di tingkat akar rumput hingga pelosok desa. Kedudukan sebagai Ketua Tim Pemenangan merupakan kepercayaan yang diberikan Ibrahim Rewa untuk mengomandoi tim pemenangan, selain juga karena alasan kedekatan secara individual. Pengamatan lapangan oleh penulis pada bulan Februari dan Juni 2012.

<sup>7</sup> Tim Inti merupakan gabungan ‘elit-elit’ dari berbagai unsur yang dekat dengan Ibrahim seperti pengusaha lokal (H. Muhlis Matu Kontraktor memiliki dua perusahaan yaitu CV. Tiga-Tiga Jaya dan CV. Karya Palapa dan H. Saharuddin Sewang yang memiliki tiga perusahaan jasa konstruksi yaitu PT. Ikram Tiga Berlian, PT. Harfiah Graha Perkasa, PT. Sinar Jaya Abadi). LSM antaranya LSM Kopel pimpinan Azhari Ewa dan LSM Bajiki pimpinan Sukwan Kudus. Manakala media cetak lokal dikomandoi oleh *Inti Berita* dan *Aktualita*.

Tim Keluarga merupakan tim lapis kedua yang terdiri dari gabungan keluarga dekat dari pasangan Ibrahim-Makmur yang memiliki pekerjaan sebagai pengusaha, aktivis LSM dan juga birokrat. Tidak hanya itu, Tim Keluarga juga mendapat dukungan dari para sukarelawan ormas-ormas yang berafiliasi dengan Golkar seperti AMPG (Angkatan Muda Partai Golongan Karya), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Pengajian Alhidayah Golkar, Kosgoro, AMPI, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, dan lainnya.

Sementara itu, Tim SKPD merupakan gabungan dari aparat pelbagai Kantor, Dinas, Badan, Kelurahan dan Kecamatan. Tim SKPD memiliki mekanisme atau tugas khusus untuk mendekati masyarakat. Misalnya, Dinas Koperasi diarahkan untuk mendekati kelompok-kelompok koperasi rakyat di tingkat dusun dengan tujuan meraih suara sebanyak mungkin bagi pemenangan ‘Irama.’ Demikian pula dengan Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Keluarga Berencana, Dinas kesehatan (menggerakkan karyawan di level Puskesmas dan Bidan Desa), Dinas Sosial (menggerakkan Taruna Siaga Bencana), Dinas Pendidikan (menggerakkan tujuh Unit pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada setiap Kecamatan yang memiliki PNS dari tingkat TK hingga SMA, dan juga pengawas lingkup Dinas Pendidikan).

Semua informasi ini merupakan intisari dari wawancara penulis dengan Drs. Syarifuddin Hamzah (Ketua Tim Pemenangan ‘Irama’), Andi Fadli, S.ST (Kepala Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi Bidang Bina Marga Dinas PU Kab. Takalar) dan jurnalis *Pedoman Rakyat* (JS) pada 20 Juni dan 25 Juli 2012.

bergerak dengan tujuan untuk memenangkan 'Irama' secara mutlak. Jika merujuk kajian Chia-Hung Tsai (2003:50), pegawai pemerintah akan membantu *incumbent* untuk mempertahankan kekuasaannya karena terdapat kepentingan yang dibawa oleh masing-masing pegawai, entah itu promosi jabatan, upeti, atau kepentingan lainnya.

Kedua, mengintervensi penetapan anggota PPK, PPS, KPPS serta Panwaslu jelang Pilkada. Oleh karena penentuan calon anggota PPK, PPS dan KPPS hanya boleh diusulkan melalui camat dan kepala desa/kelurahan, akibatnya PPK, PPS dan KPPS bercenderungkan memihak kepada *incumbent*.<sup>8</sup> Jika demikian, maka persaingan menjadi tidak sehat sehingga prinsip demokrasi yang disyaratkan oleh Dahl (1992:19) seperti adanya lembaga demokratik dalam menyelenggarakan pemilihan serta wujudnya pemilihan yang bebas dan adil tidak terpenuhi. Apa lagi, *incumbent* tanpa bersalah kerap menggunakan sarana dan prasarana pemerintah desa atau kelurahan sebagai sekretariat 'Irama.' Misalnya, seluruh sekretariat PPK menggunakan salah satu ruangan kantor camat dan tidak jarang sekretariat PPS menggunakan kantor desa atau kelurahan. Dampak negatifnya netralitas penyelenggara Pemiluakada dipertanyakan.

Tidak berbeda dengan PPK, PPS dan KPPS, Panwaslu pun dipertanyakan keindependennannya. Hal tersebut karena beberapa kasus dibiarkan oleh Panwaslu, seperti: (i) surat suara yang disembunyikan oleh Kepala Desa Parangmata (Kecamatan Galesong Utara) sebanyak lebih dari 120 surat suara; (ii) tiga hari sebelum Pemiluakada, Ibrahim Rewa dibiarkan membagikan Raskin kepada masyarakat meskipun telah masuk masa tenang, dan beberapa lagi lainnya. Kendati demikian, bukan berarti 'Irama' tidak bekerja keras. 'Irama' berusaha sebaik dan sekuat mungkin dalam menyediakan pelayanan pengobatan secara cuma-cuma, memberikan bantuan kepada seluruh mesjid melalui safari keliling Jumat melalui Bantuan Sosial mesjid (Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kabupaten Takalar), mengadakan kegiatan olahraga seperti bola Voli (Ibrahim Rewa Cup yang diselenggarakan oleh organisasi motor Vespa Takalar SOG 777) dan lain-lain. Dan hasilnya 'Irama' terpilih menjadi pasangan bupati dan wakil bupati Takalar untuk periode 200-2012.

Setelah terpilih kembali sebagai Bupati Takalar Ibrahim Rewa kemudian melakukan perombakan terhadap 'kabinet' pemerintahnya. Mereka yang sehaluan selama pelaksanaan Pemiluakada dipromosi dan mereka yang berseberangan didemosi. Ketua Tim Pemenangan, Drs. Syarifuddin Hamzah sebagai contoh, dipromosikan menjadi Kadis Sosial dan Pariwisata. Syamsul Kamar, saudara kandung Syamsul Molla (mantan pimpinan Bank Mandiri Sulawesi Selatan) yang menjadi investor politik 'Irama' dilantik menjadi Dirut PDAM Takalar—bahkan kini dianggap oleh banyak orang pihak sebagai 'broker' jabatan dan proyek di Kabupaten Takalar.<sup>9</sup> Sirajuddin Saraba (Kasubag Tramtib) dipromosikan menjadi Kepala Kantor Polisi Pamong Praja, Drs. Syarifuddin Hamzah (Kabag. Humas) dilantik menjadi Kabag Kesos dan

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Nashar Baso di Kabupaten Takalar pada 23 Februari 2012.

<sup>9</sup> Mengenai investor politik, bukan hanya Syamsul Molla saja yang membantu keuangan 'Irama.' Setidaknya ada beberapa nama lain. Antaranya H. Sahar (pengusaha dari Gowa) dan Muhlis Matu (pengusaha jasa kontruksi, masih keluarga istri Ibrahim Rewa dan mantan anggota DPRD Kabupaten Takalar dari PBB (periode 2004-2009). Selepas 'Irama' menduduki kursi pimpinan eksekutif di Kabupaten Takalar diberikan beberapa proyek seperti proyek pembangunan pemecah ombak di Pantai Lamangia Desa Tope Jawa diberikan ke H. Muhlis Matu melalui CV. Karya Palapa. Demikian pula dengan H. Saharudin Sewang melalui PT. Harfiah Graha Perkasa yang mengelola proyek pembangunan jalan beton dan pengaspalan jalan di Maradekaya. Informasi ini diperoleh dari Drs. Syarifuddin Hamzah dan Andi Fadli, S.ST. yang diwawancara secara terpisah oleh penulis pada 20 Juni dan 25 Juli 2012

kemudian dipromosikan lagi menjadi Kadis Sosial Budaya dan Pariwisata, Basri Sulaiman (Kabag Kependudukan dan Capil) dipromosikan sebagai Kadis Perindag dan Tamben, Drs. Ridwan Nur (Kabag. Tata Pemerintahan) dipromosikan menjadi eselon II/b sebagai Kadis Perikanan dan Kelautan (kemudian digantikan oleh Drs. Rivai, Camat Galesong Utara), Drs. Yuppar (Kabag. Umum) dipromosikan menjadi Kepala Badan Keuangan eselon II/b. Selain itu, para ujung tombak di tingkat kecamatan tidak luput dari promosi. Camat Galesong Utara, Drs. Rivai, dipromosikan menjadi Kabag Ekonomi dan kemudian menjadi Kadis Perikanan Kelautan (padahal beliau memiliki latar pendidikan sarjana pemerintahan); Camat Polongbangkeng Utara, Drs. Rijal, dilantik menjadi Sekdis PU kemudian dipromosikan sebagai Kadis Transmigrasi; Camat Galesong Selatan, Drs. Rahman Suro, dipromosikan sebagai Kabag Kependudukan dan Catatan Sipil kemudian dilantik menjadi Kadis Pekerjaan Umum; Camat Pattallassang, Hadawang Epong, dipromosikan menjadi Eselon II/b sebagai staf ahli.<sup>10</sup>

Tidak jauh berbeda dengan kasus Pemilukada lainnya. Ibrahim Rewa juga melantik anak dan sanak familinya ke dalam pemerintah. Anak ketiga Ibrahim, Moh. Yasin Ibrahim yang diangkat sebagai PNS pada tahun 2004, langsung mendapatkan posisi sebagai camat di Kecamatan Pattallassang; bahkan saat ini beliau telah menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Anak keduanya, Megawati Ibrahim, dilantik menjadi Kepala Bidang Aset Daerah di Badan Pengelola Keuangan Daerah sebelum Ibrahim dikukuhkan sebagai Bupati Takalar untuk periode 2007-2012; saat ini menjabat sebagai sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar. Sedangkan putra pertamanya, Natsir Ibrahim, telah menjadi anggota DPRD Takalar untuk masa jabatan yang kedua (2004-2009 dan 2009-2014) dari Partai Golkar sekaligus Ketua DPD KNPI Takalar.<sup>11</sup> Selain itu, kemenakan dari isteri Ibrahim Rewa, Abbas Tola dan istrinya pun tidak luput dari peruntungan. Saat ini Abbas menduduki posisi Kepala Dinas Sosial dan isterinya menjadi kepala bidang di Dinas Pendidikan. Ridwan Tiro SE. (kemenakan isteri Bupati Takalar) dilantik sebagai kepala bidang di Dinas Pendidikan; bahkan sekarang ini beliau telah menjadi Kepala Dinas Pendidikan merangkap Ketua PGRI di Kabupaten Takalar.

Secara keseluruhan, Pemilukada di Kabupaten Takalar pada tahun 2007 telah menunjukkan suatu kedinamikan politik yang bernuansa patronase politik. Ini karena Pemilukada selalu menghadirkan kawan dan lawan di hampir semua aspek kontestasi. Mereka yang dekat dan mendukung bupati yang menang akan mendapat 'hadiah' dari kedekatannya (patronase politik) dengan kandidat yang didukungnya, sedangkan mereka yang berseberangan mendapatkan 'bala.' Perombakan kabinet di Kabupaten Takalar (yang meliputi kepala dinas dan

---

<sup>10</sup>Semua nama ini dinyatakan sebagai klien Ibrahim Rewa selama Pilkada 2007. Informasi ini diperoleh penulis selama melakukan pengamatan lapangan langsung dan wawancara kepada banyak pihak pada bulan Februari dan Juni 2012.

<sup>11</sup>Natsir dipersiapkan Ibrahim untuk meneruskan dinasti politiknya. Dinasti politik dalam artikel ini dimaksudkan untuk menunjuk kepada perilaku yang relatif serupa dengan makna 'dinasti' dalam arti politik tradisional. Yaitu penguasa secara sengaja meletakkan keluarga, saudara dan kerabatnya pada jabatan-jabatan strategis dengan tujuan untuk membangun suatu 'kerajaan' politik dalam pemerintahan baik di tingkat nasional maupun subnasional. Langkah ini diambil dengan tujuan mereka yang menjadi anggota dinasti politik akan saling menjaga dan saling taat-setia satu sama lainnya agar kekuasaan kekal dalam cengkraman mereka. Menempatkan keluarga atau saudara di jabatan-jabatan strategis tentunya memudahkan para penguasa untuk mengontrol dan mengendalikan semua hal yang diperlukan oleh sang penguasa sehingga tujuan nonpolitik dapat dengan mudah direalisasikan. Perbincangan lebih lanjut mengenai dinasti politik, rujuk Leo Agustino (2011).

Oleh karena itu, Natsir didorong untuk menerima tongkat estafet Ketua Partai Golkar Takalar periode 2009-2014 dari ayahnya. Tetapi kehendak ini untuk sementara mendapat kendala dari beberapa elit politik lokal antaranya Burhanuddin Baharuddin yang mendapatkan mandat langsung dari Aburizal Bakrie (ketua DPP Golkar) pada Mei 2012 untuk membahterai Partai Golkar Kabupaten Takalar, dan selanjutnya dipersiapkan untuk maju sebagai calon Bupati Takalar pada Pilkada 2012. Persaingan ini masih terjadi sampai dengan penulis melakukan pengamatan lapangan pada pertengahan Juli 2012.

pimpinan badan, lembaga, kantor dan lainnya) menunjukkan patronase politik yang berlogika: 'siapa mendukung siapa (akan) mendapat apa.' Akibatnya, demokrasi teracuni oleh kepentingan patron dan para klien.

### **Patronase di Provinsi Jambi: kekuasaan melalui pernaungan**

Pemilihan kepala daerah Provinsi Jambi yang diselenggarakan pada 19 Juni 2010, menarik untuk dianalisis karena dapat dengan mudah menerangkan mekanisme patronase politik pasca-Pemilukada. Dari calon yang maju untuk merebut kursi gubernur menunjukkan wajah-wajah baru dalam politik Jambi. Mengapa dikatakan wajah baru? Ini karena realita politik di Jambi sebelumnya (hanya) dikuasai oleh dua 'dinasti' saja yaitu dinasti Manapiah dan dinasti Nurdiniah.<sup>12</sup> Tetapi pada Pemilukada 2010, kekuatan dua dinasti ini nampak telah digeser oleh nama-nama di luar kedua keluarga ini. Setidaknya ada empat pasangan calon yang ikut meramaikan pesta demokrasi lokal di negeri 'Sepucuk Jambi Sembilan Lurah.' Nama-nama calon tersebut (mengikuti nomor urut Pilkada Gubernur Jambi 2010) adalah Zulfikar Ahmad-Ami Taher, Hasan Basri Agus-Fahreri Umar, Madjid Mu'Az-Abdullah Hich dan Safrial-Agus Setyonegoro. Semua nama yang mengajukan diri sebagai gubener dalam Pemilukada tersebut, menariknya, adalah penguasa di daerahnya masing-masing dan masih memiliki jabatan aktif dalam struktur pemerintahan *incumbent*. Zulfikar Ahmad misalnya, adalah orang nomor satu di kabupaten Bungo; Hasan Basri Agus (yang kini dikenal dengan sebutan HBA) adalah tokoh politik kenamaan di kabupaten Sarolangun yang juga menjabat sebagai Bupati Sarolangun; pasangan calon Madjid Mu'az-Abdullah Hich (nomor urut tiga) keduanya adalah Bupati Tebo dan Bupati Tanjung Jabung Timur; begitu pula dengan Safrial yang menjabat Bupati Tanjung Jabung Barat.

Dua dari empat pasangan calon di atas mendapat 'restu' dari dua dinasti yang berkuasa di Jambi. Pasangan Hasan Basri Agus-Fahreri Umar sebagai contoh, mendapatkan dukungan penuh dari dinasti Manapiah. Bukan hanya mendapat sokongan moral dari dinasti Manapiah saja, tetapi juga mereka didukung oleh lima partai yaitu Partai Demokrat (PD), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Patriot (PPP) dan Partai Persatuan Daerah (PPD). Dukungan dinasti Manapiah kepada pasangan HBA-FU nampak jelas melalui ketua Partai Golkar di Jambi yang diketuai Zoerman Manap. Sedangkan pasangan Madjid Mu'Az-Abdullah Hich (MM-Hich) mendapat 'restu' dari dinasti Nurdiniah sekaligus menerima dukungan dari Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati

---

<sup>12</sup>Dinasti Manapiah dan Nurdiniah telah melahirkan 'dinasti' dengan cara membangun basis kekuatan bisnis, partai politik dan kekerabatan. Dinasti Manapiah didirikan oleh Abdul Manap orang Jambi pertama yang menjadi gubernur di sana pada tahun 1967. Kekuasaannya kemudian diwariskan kepada Zoerman Manap anak sulungnya Abdul Manap yang mempunyai pekerjaan utama sebagai seorang pengusaha di samping juga selalu Ketua Dewan Pimpinan Daerah I Partai Golongan Karya (DPD I Golkar) dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi periode 2004-2009. Di samping itu, Zoerman Manap, dinasti Manapiah juga meletakkan Arifin Manap (adik Zoerman) sebagai ketua DPD II Partai Golkar Kota Jambi dan mantan Wali Kota Jambi periode 1999-2008 (memangku jabatan selama dua periode).

Sementara itu dinasti Nurdiniah, didirikan oleh Nurdin Hamzah (seorang pengusaha besar) yang mulai menguasai Jambi pada akhir tahun 1980-an. Zulkifli Nurdin (anak sulung Nurdin Hamzah) menjadi tokoh terkemuka di Jambi sekaligus penerus bapaknya karena pernah menjabat ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi (DPW PAN) Jambi dan Gubernur Jambi selama dua periode (2001-2010). Selain nama besar Zulkifli Nurdin, nama Hazrin Nurdin (adik Zulkifli) mempunyai peran sangat besar dalam dunia ekonomi di Jambi. Saat ini beliau pun tengah menjabat ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW PAN) Provinsi Jambi ([www.metrojambi.com/headline/3718-menanti-kiprah-sang-pewaris-kekuasaan.html](http://www.metrojambi.com/headline/3718-menanti-kiprah-sang-pewaris-kekuasaan.html) 22 Desember 2013). Kedua realita di atas—dinasti Manapiah dan Nurdiniah—menunjukkan bagaimana penguasaan kedua keluarga ini dalam sosiopolitik dan sosioekonomi di Jambi. Sebagai bahan pemerikayaan dan perbandingan, rujuk pula Syarif Hidayat (2007).

Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Bulan Bintang (PBB). Dukungan dinasti Nurdiniah kepada pasangan MM-Hich ditunjukkan selama kampanye politik, baik kampanye langsung di lapangan terbuka maupun melalui poster-poster dan risalah-risalah yang meletakkan wajah Zulkifli di dalamnya. Selain itu, dukungan dinasti Nurdin tidak saja melalui partai politik dan birokrasi yang tengah dikuasai Zulkifli Nurdin, tetapi juga lewat kekuatan finansial. Hazrin Nurdin, seorang pengusaha konstruksi besar dan kenamaan di Jambi yang masih bagian dari dinasti Nurdiniah, memberikan cukup banyak uang untuk kepentingan Pilkada pasangan MM-Hich.<sup>13</sup> Tindakan sebegini menurut Syarif Hidayat (2007:16), membentuk realita politik ke arah wujudnya pemerintah bayangan (*shadow state*). Pemerintahan seperti diargumenkan Syarif (2007) wujud ketika Zulkifli Nurdin menjabat sebagai gubernur. Sebab, dalam kesempatan yang sama Hazrin Nurdin memanfaatkan posisi kakaknya untuk menjadi pemangku otoritas informal yang secara langsung maupun tidak turut mempengaruhi penyelenggaraan pemerintah formal. Beberapa kasus membuktikan hal ini seperti bagaimana Hazrin turut menentukan promosi jabatan di Satuan Kerja Pemerintahan Daerah atau tidak, beliau pun turut berperan sebagai aktor mediasi antara Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan gubernur, beliau juga memainkan peran sebagai wakil eksekutif ketika 'bernegosiasi' dengan para pengusaha dan beliau juga menjadi *intermediate* antara gubernur dengan partai politik; walau sebenarnya beliau berada di luar struktur pemerintahan formal. Peranan seperti ini menggambarkan adanya pemerintah bayangan dalam lembaga eksekutif di Jambi.

Di luar itu semua, pertanyaannya, mengapa keluarga Nurdiniah memutuskan untuk menyokong pasangan MM-Hich? Satu yang pasti bahwa Abdullah Hich yang mencalonkan diri sebagai wakil gubernur adalah keluarga dari dinasti Nurdiniah. Kemunculan Hich dalam perebutan kekuasaan dianggap sebagai perwakilan dari dinasti Nurdiniah yang diharapkan dapat melanggengkan kekuasaan dinasti ini. Kendati demikian, dinasti Nurdiniah adalah *incumbent*, tetapi pemilihan gubernur untuk periode 2010-2015 justru dimenangi oleh pasangan calon Hasan Basri Agus-Fahrori Umar. Mengapa hal ini bisa terjadi?

Sebelum menjawab pertanyaan di atas, dibagian ini penulis memanfaatkan untuk menguraikan perihal Pemilu Pilkada berkenaan. Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Provinsi Jambi menunjukkan bahwa suara dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Jambi sebanyak 2.231.632 orang pemilih. Namun malangnya, dari dua juta lebih pemilih hanya 1.495.051 suara (sah) saja yang menyertai pesta demokrasi di Jambi. Malah, suara yang diperoleh oleh pasangan HBA-FU hanya sebanyak 607.030 (atau 41,83%). Angka ini boleh dikatakan kalah dari jumlah suara Golput masyarakat Jambi yang mencapai 694.329 suara—mengungguli HBA-FU dengan 87.299 suara. Di luar diskusi mengenai hal tersebut, suara yang diperoleh oleh pasangan lainnya adalah sebagai berikut (mengikuti perolehan suara): pasangan calon Madjid Mu'Az-Abdullah Hich mendapat 384.012 suara (atau 28,23%), pasangan Zulfikar Ahmad-Ami Taher memperoleh 297.232 suara (16,52%) dan pasangan Safrial-Agus Setyonegoro mendapat dukungan suara sebesar 206.646 (atau 13,42%) ([http://www.jambiindependent.co.id/jio/index.php?option=com\\_content&view=article&id=9513&catid=4&Itemid=6](http://www.jambiindependent.co.id/jio/index.php?option=com_content&view=article&id=9513&catid=4&Itemid=6) 24 Desember 2013; [www.jambiexpres.co.id/index.php/utama/13718-golput-pilgub-jambi-3169-persen.html](http://www.jambiexpres.co.id/index.php/utama/13718-golput-pilgub-jambi-3169-persen.html) 24 Desember 2013).

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Sm (salah seorang dosen PTN di Jambi), pada 21 Februari 2012. Nama sengaja diinisialkan atas permintaan yang bersangkutan.

Kembali ke pertanyaan sebelumnya, (dengan menggunakan kalimat berbeda) mengapa dinasti Nurdiniah (yang *incumbent*) dan mendukung pasangan MM-Hich bisa dikalahkan oleh HBA-FU? Tidak mudah untuk mendapatkan jawaban pasti dari pertanyaan ini, tetapi satu yang bisa dianalisis adalah tim sukses HBA-FU merupakan instrumen paling penting dalam menentukan pemenangan pasangan tersebut. Sebagai contoh, Efendi Hatta, seorang tim pengusung HBA-FU adalah Ketua Gabungan Pengusaha Kontruksi Indonesia (Gapensi) Jambi yang juga Ketua DPRD Jambi serta menjabat sebagai Ketua Partai Demokrat Provinsi Jambi. Dengan kedudukan demikian, paling tidak, Hatta dapat memberikan kemudahan ekonomi dan politik kepada HBA-FU untuk dalam menjalin relasi politik dan memperkuat basis ekonomi selama Pemilu. Selain itu Hatta, tim sukses HBA-FU memiliki orang seperti Zoerman Manap (Ketua Partai Golkar, mantan ketua DPRD Jambi dan juga pengusaha besar di Jambi).<sup>14</sup> Dukungan Hatta dan Zoerman terhadap HBA-FU tentu saja memperkuat posisi HBA dalam memuluskan jalannya menuju Jambi I. Tidak hanya itu, Ketua DPD PKS, melihat Hatta dan Zoerman menyokong HBA, ia pun lantas memberi dukungan penuh terhadap pasangan HBA-FU. Ini karena sebelum HBA menjadi Ketua Partai Demokrat Provinsi Jambi, HBA adalah kader dari PKS. Hubungan ini tentu memberi dampak positif bagi PKS apabila HBA menjadi gubernur, sebab sebelumnya peta politik di Jambi dicoraki oleh peran PAN. Semua tali-temali tertulis di atas merupakan bibit bagi tumbuhnya patronase politik pasca-Pilkada. Paling tidak ketaatan dan kesetiaan yang diberikan oleh para klien akan 'dilunasi' oleh patron ketika ia mendapatkan kursi Jambi I.

Segara setelah gubernur dan wakil gubernur terpilih dilantik pada 3 Agustus 2010, maka roda pemerintahan di level subnasional ini mulai bergerak. Seiring dengan hal tersebut, sejumlah gejala patronase politik mulai nampak ke permukaan khususnya yang terkait dengan politik balas jasa gubernur terpilih. Antaranya ialah pengangkatan ketua tim sukses HBA-FU, Asnawi Nasution, sebagai Komisaris Utama Bank Jambi.<sup>15</sup> Masuknya Asnawi Nasution dalam jajaran komisi ini paling tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak. Bagi HBA, posisi Komisaris Utama Bank Jambi turut mempermudah lancarnya bisnis para kolongmerat yang pernah mendukung HBA-FU dalam Pemilu lalu. Sedangkan bagi Asnawi, kedudukan ini adalah buah dari hasil benih yang disebarnya pada masa pra-Pilkada.

Selain Asnawi, tokoh lain yang mendapat 'buah' dari patronase politik adalah Akmal Thaib. Beliau adalah bagian dari tim sukses HBA-FU untuk daerah Kabupaten Kerinci. Dalam konteks kalkulasi politik, dapat dikatakan bahwa Kabupaten Kerinci bukanlah basis yang cukup kuat bagi HBA-FU dalam mendulang suara. Walaupun begitu, usaha Akmal untuk mendorong suara HBA-FU patut diapresiasi sebab ia berani mengeluarkan uang sejumlah Rp.1 miliar hanya untuk memenangkan HBA.<sup>16</sup> Berkat mobilitas Akmal Thaib dan timnya, suara HBA-FU cukup

<sup>14</sup>Wawancara dengan Dd (salah seorang dosen PTN di Jambi), pada 12 Maret 2012. Nama sengaja diinisialkan oleh penulis atas permintaan yang bersangkutan.

<sup>15</sup>Asnawi Nasution adalah mantan wakil ketua DPRD Jambi periode 1987-1992. Beliau memiliki karir politik dan keorganisasian yang cukup mumpuni seperti wakil ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Jambi, ketua DPD KNPI Provinsi Jambi, penasehat DPD Angkatan Muda Pemuda Indonesia (AMPI) Provinsi Jambi, pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Jambi, ketua Pemuda dan Cendekiawan Golkar Provinsi Jambi, bendahara DPD Partai Golkar Provinsi Jambi, anggota Dewan Penasehat Partai Golkar Provinsi Jambi, ketua Komisi B DPRD Provinsi Jambi, ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Jambi ([www.jambiindependent.co.id/j\\_io/index.php?option=com\\_content&view=article&id=3536:asnawi-nasution-isi-kegiatan-masa-pensiun&catid=31:evergreen&Itemid=39](http://www.jambiindependent.co.id/j_io/index.php?option=com_content&view=article&id=3536:asnawi-nasution-isi-kegiatan-masa-pensiun&catid=31:evergreen&Itemid=39) 26 Desember 2013).

<sup>16</sup>Dana yang dikeluarkan Akmal Thaib mesti dipahami sebagai dana yang diperuntukkan bukan untuk bantuan semata. Dana yang dikeluarkan tersebut merupakan upayanya untuk menunjukkan kesetiiaannya kepada sang patron agar dikemudian hari mendapat pelbagai keuntungan. Dalam konteks ini Akmal membangun logika 'barter politik' di mana untuk mengembalikan

terangkat di sana. Melihat jerih payah tersebut, HBA kemudian memosisikan Akmal sebagai pejabat sementara Wali Kota Kerinci dan menjadi pejabat Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan.

Dari golongan birokrasi pun HBA melakukan pendistribusian kekuasaan kepada klien-kliennya. Syahasaddin misalnya, birokrat yang dekat dengan HBA dan dikenal setia kepadanya ketika masih menjabat Bupati Sarolangun, ditempatkan sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah menggantikan Zuhi Asran. Begitu juga dengan Alharis (Kepala Bagian di Bappeda Kabupaten Sarolangun) ditarik oleh HBA ke provinsi untuk menjabat Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum Sekretarian Daerah Provinsi ([http://www.jambi-independent.co.id/jio/index.php?option=com\\_content&view=article&id=9998:hba-mulai-rombak-kabinet&catid=1:metrojambi&Itemid=3](http://www.jambi-independent.co.id/jio/index.php?option=com_content&view=article&id=9998:hba-mulai-rombak-kabinet&catid=1:metrojambi&Itemid=3) 27 Desember 2013). Sementara itu, Idham Halid (mantan Sekretaris Kota dan berasal dari kabupaten yang sama dengan FU) diposisikan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Kedudukan ini dinilai cukup 'empuk' karena di bawah kepemimpinan HBA-FU sebab pada masa sekarang ini pendidikan dijadikan visi utama pasangan ini menuju 'Jambi Emas.' Dalam arti kata lain, dalam dinas ini terdapat banyak uang yang bisa digunakan sebagai barter politik patron kepada para kliennya yang telah setia dan mendukungnya selama Pemilu lalu.

Merujuk pada realita di atas, patronase politik selama Pemilu gubernur Jambi menunjukkan adanya mekanisme simbiosis mutualisme. Di satu sisi, kepala daerah memerlukan sokongan material dan aktual dari banyak pihak—yang diperankan oleh tim sukses; di sisi lainnya, tim sukses memberikan perhatian, tenaga bahkan uangnya untuk sang patron dengan satu tujuan yaitu mendapatkan 'perhatian' lebih dari sang penaungannya. Sebenarnya bukan hanya jabatan yang diberi oleh sang patron kepada para klien, malah untuk beberapa kasus seperti pendistribusian uang proyek, pemberian beasiswa dan uang penelitian, penyediaan formasi tenaga kerja dan lainnya merupakan beberapa bentuk lain dari simbiosis mutualisme patronase tersebut. Mekanisme ini bisa berjalan karena kepala daerah dianggap sebagai *first order resources* yang secara langsung menguasai dan mengendalikan sumber daya strategis di daerah. Karena itu, tidak heran apabila banyak klien yang bersedia untuk tetap taat-dan-setia kepada sang patron agar mendapat bagian dari sumber strategis yang dikuasai oleh kepala daerah.

## Penutup

Perbincangan dalam artikel ini telah menggariskan satu hal penting bahwa Pemilu selalu berkait rapat dengan patronase politik. Kasus di Kabupaten Takalar dan Provinsi Jambi menunjukkan realita tersebut. Elit yang berseberangan dengan bupati terpilih secara pasti

---

dana yang telah dihabiskannya, maka jabatan yang dianugerahkan kepadanya (oleh patron politiknya) dianggap boleh dijadikan sebagai tempat baginya untuk mengganti segala uang yang telah dikeluarkannya. Oleh karena itu, selama memegang jabatan sebagai pejabat sementara Wali Kota Kerinci, Akmal Thaib memasukkan 30 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) (untuk penerimaan bulan Desember 2009-2010) sebagai alat baginya guna mengganti uang yang telah dikeluarkan senilai Rp.1 miliar. Untuk itu, setiap individu yang diterima sebagai CPNS diminta membayar senilai Rp.100-180 juta. Beberapa nama yang diterima sebagai CPNS dan membayar senilai uang seperti tersebut di atas ialah Puti Mayang Sari (33 Tahun), Safrul (30 Tahun), Novi (30 Tahun), Edwin (31 Tahun) Rori Putera (29 Tahun), Helpi (24 Tahun) dan ada sekitar 20 orang lagi dari Desa Lempur. Menariknya lagi, ada individu yang memberikan lahan pertanian seluas 3-4 hektar kepada Akmal Thaib untuk meloloskan anaknya menjadi PNS. Padahal lahan pertanian tersebut dimiliki oleh beberapa kepala keluarga dalam desa tersebut dan kini tengah menjadi sengketa. Wawancara dengan JH (seorang wartawan di Kerinci) pada 20 Maret 2012.

tergeser dari posisi awal yangudukinya, manakala elit yang sehaluan langsung mendapat promosi. Keadaan ini mudah dipahami dengan cara memahami konstelasi politik sebelum Pemiluakada diselenggarakan. Calon yang maju bersaing dalam Pemiluakada akan selalu mencari klien yang sejalan dengan kepentingannya dengan harapan mendapat serta mendulang suara yang besar dari klien-klien mereka. Di sisi lain, para klien mencari patron yang kira-kira berpotensi memenangi pemilihan kepala daerah dengan tujuan mendapat keuntungan dari interaksi tersebut. Tetapi malangnya, tidak semua calon menjadi pemenang. Calon yang memenangi Pemiluakada, merujuk pada logika patronase politik, kemudian mendistribusikan kekuasaannya kepada klien-kliennya yang setia dan loyal dalam bentuk kedudukan dan jabatan yang lebih tinggi dari jabatan sebelumnya; dan para pesaing disingkirkan. Akibatnya reformasi politik kurang berhasil menyuburkan demokrasi subtansial karena yang hadir kemudian adalah demokrasi yang teracuni (*poisoned democracy*).

### Daftar Pustaka

- Allison, G.T. 1978. Bureaucratic Politics. Dlm. Francis E. Rourke (ed.). *Bureaucratic power in national politics*, 159-178. Boston: Little, Brown and Co.
- Chia-Hung Tsai. 2003. Party voting in comparative perspective: the United States, Taiwan, And Japan. Disertasi. The Ohio State University.
- Dahl, R.A. 1992. *Demokrasi dan para pengkritiknya*. Terj. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Geddes, B. 1994. *Politician's dilemma: building state capacity in Latin America*. Los Angeles: University of California Press.
- Keputusan KPU Kabupaten Takalar 2007 Nomor 22/P.KWK-TK/XI/2007 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2007.
- Keputusan KPU Kabupaten Takalar 2007 Nomor 163/P.KWK-TK/XI/2007 tentang Tahapan, Program Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Lande, C.H. 1977. Introduction: The Dyadic Basic of Clientalism. Dlm. Steffen W. Schmidt & James C. Scott (eds.). *Friends, followers and factions a reader in political clientalism*, xiii-xxxvii. Berkeley: University of California Press.
- Leo Agustino. 2011. *Sisi gelap otonomi daerah*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Ripley, R.B. 1978. Congress and the bureaucracy. Dlm. Francis E. Rourke (ed.). *Bureaucratic power in national politics*, 53-77. Boston: Little, Brown and Co.
- Scott, J.C. 1972. Patron-client politics and political change in Southeast Asia. *American Political Science Review* 66(1): 91-113.
- Weingrod, A. 1968. Patron, patronage and political parties. *Comparative Studies in Society and History* 10(1968): 376-400.
- Syarif Hidayat. 2007. Bisnis dan politik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pasca Pilkada. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 25(1):1-64.



